

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik dan deskriptif dengan pendekatan *mixed method* yang telah dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik disimpulkan *collaborative governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
2. *Collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota belum berjalan dengan baik dan optimal, yaitu pada kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, proses kolaborasi tatap muka, proses kolaborasi pemahaman bersama dan proses kolaborasi hasil sementara. Sedangkan pada proses kolaborasi membangun kepercayaan dan proses kolaborasi komitmen terhadap proses telah berjalan dengan baik.
3. Strategi yang dapat dilakukan agar *Collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota belum berjalan dengan baik dan optimal, berdasarkan urutan prioritas 1 yaitu dimensi desain institusional adalah: menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU), membuat definisi tugas dan fungsi, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan membuat serta melaksanakan nilai-nilai dasar dari *collaborative governance*.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi akademisi, pemerintah serta masyarakat yaitu, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, memberikan masukan serta rujukan penelitian bagi peneliti selanjutnya untuk menguji variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.
2. Bagi Pemerintah, menyelidiki dampak jangka panjang dari penerapan *collaborative governance* dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kepercayaan publik baik secara nasional maupun daerah.
3. Bagi masyarakat, diperlukan upaya untuk memperbaiki persepsi responden, mengedukasi wajib pajak tentang syarat lunas PBB dan meningkatkan aksesibilitas informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, V.R. dan Rahayu, AS.R. 2022. *Analisis Aktor dan Faktor Komdisi Awal Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Program Beli Kreatif Lokal Jabodetabek*. Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 4. Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>.
- Aditya, D .K. 2019. *Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara*. <https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>. Diakses dari internet.
- Afia, S.U.M dan Hoerudin, C.W. 2020. *Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi*. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, Volume 2. No. 2 Mei 2020.
- Ansell dan Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- Arga, Galih. 2018. *Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam kerangka Good Financial Governance*. Media Luris Vol.1. No.2 Juli 2018, e-ISSN: 2621-5225.
- Arifin., S dan Dewi., U. 2018. *Collaborative Governance Dalam Program Rintisan Desa Inklusif di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman*. Journal of Public Policy and Administration Research, Vol.3, No.3. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/12672/12213>.
- Assauri., Sofjan. 2013. *Strategic Management*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 7.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>. Diakses dari internet.
- Bank of Korea. 2021. *GDP Growth Trend 2011-2020*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20210126000651320>.
- Barry, B. (2002). *Social Exclusion, Social Isolation, and the Distribution of Income*. In J. Hills, Le Grand, & D. Piachaud (Eds.), *Understanding Social Exclusion* (pp. 13-29). Oxford: Oxford University Press.

- BBC News Indonesia. (3 Maret 2020). *Virus Corona: Dampaknya 'Lebih Buruk Daripada Krisis Finansial 2008' dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bisa Tinggal Separuh*. Diakses pada 20 Maret 2021, dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51720514>.
- Borg and Gall. 2003. *Education Research*. New York: Allyn and Bacon.
- Bolnick, B. 2004. *Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in SADC Regions*. Technical Report submitted to USAID/RCSA.
- Creswell., J.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detik.com. 2020. *Kelemahan Insentif Pajak*. [Http://https://news.detik.com/kolom/d-5072305/kelemahan-insentif-pajak](http://https://news.detik.com/kolom/d-5072305/kelemahan-insentif-pajak).
- Dewanti., A.T, Apriawati, Y., Hutapea, R.S. 2021. *Analisis Implementasi Relaksasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bandung pada Masa Pandemi Covid-19*. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 1, No. 3, June 2021, pp. 564 – 576. <file:///C:/Users/hp/Downloads/3208-Article%20Text-8615-1-10-20211104.pdf>.
- Diana, S. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Dwiyanto., A. 2011. *Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif dan kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Edward III, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Fitriani., I. 2017. *Collaborative Governance Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Collaborative Governance Pada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen)*. Tesis: Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- George A. Steiner dan Jhon B. Miner. 1997. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga, h. 6.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementations in the Third World*. Princeton University Press: New Jersey.
- Hayashi, A dan Kleiman, A.J. 2020. *Property Taxes During the Pandemic*. Tax Notes States, Vol.88, June, 22, 2020. Virginia Public Law and Legal Theory Research Paper No.2020-58. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3658800>.

- Indahsari, D. N., Fitriandi, Primandita. 2021. *Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN*. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, Vol.3, No.1\, Hal.24-36. 26 Juni 2021.
- Kompas.com. 2021. *Sri Mulyani Sebut Ekonomi Global Alami Kontraksi Terburuk dalam 150 Tahun Terakhir*. Diakses dari Internet, <https://money.kompas.com/read/2021/04/06/153706626/sri-mulyani-sebut-ekonomi-global-alami-kontraksi-terburuk-dalam-150-tahun>.
- Kontan. 2022. *China Tunda Uji Coba Perluasan Pajak Properti, Ini Penyebabnya*. <https://internasional.kontan.co.id/news/china-tunda-uji-coba-perluasan-pajak-properti-ini-penyebabnya>.
- Kotler, P. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Edisi tiga belas Bahasa. Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E dan Suryadi. 2020. *Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S*. *Journal of Public Administration Studies* Vol.5, No.1, pp.33-38. URL: <http://www.jpas.ub.ac.id/index.php/jpas>.
- Mulyati, D. 2021. *Kinerja Fiskal: Penerimaan Pajak 2020 Minus 19,7%, Ini Datanya*. <https://news.ddtc.co.id/penerimaan-pajak-2020-minus-197-ini-data-lengkapnya-26766>. Diakses dari internet.
- Nasrulhaq. 2020. *Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*. *Jurnal Administrasi Publik*, Desember 2020, Volume 6, Nomor 3. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/2261/3081>. (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X).
- Nurisdianto, W.E. 2019. *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Diakses dari Internet <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.
- Octavi, W.D., Tambunan, J.B., Andini, I.J., Amalia, K.P., Ibtisamah, N.P., Nugroho, A., Hermawan, S. 2022. *Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di Indonesia*. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol.5, No.3 November 2022. <https://ejournal.undiksha.ac.id>.

- Padyanoor, A. 2020. *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 30(9), 2216-2230.
- Purnomo, Eko Priyo, dkk. 2018. *Collaborative Governance: Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Rangkuti, F. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, A.C. 2017. *Strategi Pemasaran Dengan Mengurangi Komplain Konsumen Pada Ukm SKD*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Call for Paper UNISBANK ke-3 (SENDI-U3). ISBN: 9-789-7936-499-93.
- Selvi, Ramdhan, A. 2020. *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 96 – 100, E-ISSN 2622 – 0253.
- Soemitro, R. 1990. *Azas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak*. Edisi 6 .Yogyakarta: Penerbit Salemba. Empat.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Trisniati, E.T., Cadith, J. dan Nugroho, 2022. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*. Jurnal Governansi, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138 Volume 8 Nomor 1, April 2022. [file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/ebf481a6-ced3-4901-b844-521d0446f693/7-Jurnal+Governansi+Vol+8+No+1+\(April+2022\)_final.pdf](file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/ebf481a6-ced3-4901-b844-521d0446f693/7-Jurnal+Governansi+Vol+8+No+1+(April+2022)_final.pdf).
- Trusted Indonesian News Portal. 2022. *Harga Properti Terus Naik, Korsel Berikan Keringanan Pajak Rumah*. Diakses dari Internet

<https://news.ddtc.co.id/harga-properti-terus-naik-korsel-berikan-keringanan-pajak-rumah-37862>.

Van Meter, D., Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society, Vol.6, No.4.

Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Mandar Maju. Bandung. Hal. 255.

Yuting, Wang, (2020). *Financial and Tax Measures of South Korea Tackling COVID-19*. Belt and Road Initiative Tax Journal, Vol.1, No.1 (2020), <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/kz/Documents/tax/other/Belt%20and%20road.pdf>



Tabel 4.14.
Alasan Pemilihan Skor USG

No	Alternatif	Nilai USG	Alasan
Kondisi Awal			
1	Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat	<i>Urgency:</i> 8	Sosialisasi kepada tokoh masyarakat memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.
		<i>Seriousness:</i> 9	Sosialisasi kepada tokoh masyarakat memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap pentingnya pembayaran PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada tokoh masyarakat dapat menjadi lambat dalam jangka pendek, tetapi memiliki potensi untuk berkembang secara bertahap seiring waktu.
2	Sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya	<i>Urgency:</i> 7	Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya memiliki urgensi yang cukup tinggi karena mereka dapat menjadi agen penghubung yang efektif antara masyarakat dan Bapenda dalam hal pembayaran PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari pihak Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan program pembayaran PBB.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya dapat membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
3	Sosialisasi kepada Bank Persepsi	<i>Urgency:</i> 7	Sosialisasi kepada bank persepsi (BJB, BTN, BRI, BNI'46, Bank

			Mandiri, PT Pos Indonesia, dsb) memiliki urgensi yang cukup tinggi mengingat perannya sebagai penerima setoran pembayaran PBB dari wajib pajak.
		<i>Seriousness:</i> 7	Sosialisasi kepada bank persepsi memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi mengingat tugas dan fungsinya yang dapat meningkatkan capaian realisasi atas target PBB.
		<i>Growth:</i> 9	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada bank persepsi memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan optimalisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi.
4	Edukasi Penggunaan Media Pembayaran <i>Online</i>	<i>Urgency:</i> 9	Edukasi penggunaan media pembayaran online memiliki urgensi yang tinggi karena mendorong penggunaan metode pembayaran yang efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak.
		<i>Seriousness:</i> 8	Edukasi penggunaan media pembayaran online memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan keterlibatan wajib pajak dalam pembayaran PBB dan mempermudah proses administrasi.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan penggunaan media pembayaran <i>online</i> memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena perkembangan teknologi digital dan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih praktis.
4	Edukasi Penggunaan Aplikasi <i>Video Conference</i>	<i>Urgency:</i> 8	Edukasi penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memberikan alternatif komunikasi yang efektif dalam situasi yang membatasi pertemuan tatap muka.
		<i>Seriousness:</i> 7	Edukasi penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat meningkatkan aksesibilitas dan

			efisiensi dalam memberikan informasi kepada wajib pajak.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus berlangsung.
5	Fasilitas Pembayaran <i>Offline</i>	<i>Urgency:</i> 7	Fasilitasi pembayaran <i>offline</i> memiliki urgensi yang cukup tinggi karena memberikan solusi bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses ke pembayaran <i>online</i> .
		<i>Seriousness:</i> 6	Fasilitasi pembayaran <i>offline</i> memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat memberikan pilihan alternatif pembayaran kepada wajib pajak dan memperluas cakupan penerimaan PBB.
		<i>Growth:</i> 5	Pertumbuhan efek fasilitasi pembayaran <i>offline</i> cenderung stabil, dengan sedikit kemungkinan perkembangan yang signifikan.
6	Upaya Jemput Bola	<i>Urgency:</i> 9	Upaya jemput bola memiliki urgensi yang tinggi karena dapat langsung meningkatkan penerimaan PBB dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum melunasi pembayaran.
		<i>Seriousness:</i> 10	Upaya jemput bola memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi karena dapat memberikan tekanan langsung kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek upaya jemput bola cenderung stabil dalam jangka pendek, tetapi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.
Kepemimpinan Fasilitatif			
1	Mediasi Komunikasi	<i>Urgency:</i> 7	Mediasi komunikasi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memfasilitasi dialog dan pertemuan antara <i>stakeholders</i> untuk

			mencapai pemahaman dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Mediasi komunikasi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan relaksasi pemungutan PBB melalui pemahaman dan kerja sama yang baik antara pihak terkait.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek mediasi komunikasi dapat berkembang secara bertahap seiring dengan memperkuat hubungan dan kerja sama antara <i>stakeholders</i> dalam jangka panjang.
2	Kolaborasi dengan OPD Lainnya	<i>Urgency:</i> 8	Kolaborasi dengan OPD lainnya memiliki urgensi yang tinggi karena memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 9	Kolaborasi dengan OPD lainnya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memberikan dukungan dan efisiensi dalam melaksanakan relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek kolaborasi dengan OPD lainnya dapat memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.
3	Melibatkan Tokoh Masyarakat	<i>Urgency:</i> 9	Melibatkan tokoh masyarakat memiliki urgensi yang tinggi karena mereka dapat membantu menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dari relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Melibatkan tokoh masyarakat memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi sikap dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efektivitas

			sosialisasi relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek melibatkan tokoh masyarakat dapat berkembang secara bertahap seiring dengan peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.
4	Melibatkan Bank Persepsi	<i>Urgency:</i> 7	Melibatkan bank persepsi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memfasilitasi pembayaran PBB, memberikan informasi, dan memastikan ketersediaan fasilitas pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat.
		<i>Seriousness:</i> 8	Melibatkan bank persepsi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran PBB serta memperluas cakupan penerimaan.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek melibatkan bank persepsi dapat berkembang secara bertahap seiring dengan meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi wajib pajak dalam menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan.
5	Melibatkan Media Massa Setempat	<i>Urgency:</i> 6	Melibatkan media massa setempat memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat menyampaikan informasi tentang relaksasi pemungutan PBB kepada masyarakat secara luas dan cepat.
		<i>Seriousness:</i> 7	Melibatkan media massa setempat memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi wajib pajak terdampak COVID-19.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek melibatkan media massa setempat dapat berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam jangka pendek.
Desain Institusional			

1	Pembentukan Memorandum of Understanding (MoU)	Urgency: 9	Pembentukan MoU memiliki urgensi yang tinggi karena dapat mengatur kerja sama kolaboratif antara <i>stakeholders</i> secara formal dan jelas dalam relaksasi pemungutan PBB.
		Seriousness: 9	Pembentukan MoU memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memberikan landasan hukum dan mengikat bagi semua pihak terkait, sehingga memastikan komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan kolaboratif.
		Growth: 8	Pertumbuhan efek pembentukan MoU dapat berkembang dalam jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas kolaborasi antar <i>stakeholders</i> .
2	Definisi Tugas dan Fungsi	Urgency: 9	Definisi tugas dan fungsi memiliki urgensi yang tinggi karena dapat mengklarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB, menghindari tumpang tindih dan kebingungan.
		Seriousness: 9	Definisi tugas dan fungsi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.
		Growth: 8	Pertumbuhan efek definisi tugas dan fungsi dapat berkembang seiring dengan peningkatan efektivitas dan kejelasan dalam peran serta tanggung jawab masing-masing <i>stakeholder</i> .
3	Nilai-Nilai Dasar	Urgency: 8	Pemahaman akan nilai-nilai dasar kolaborasi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memberikan motivasi positif bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.

		<p><i>Seriousness:</i> 9</p>	<p>Pemahaman nilai-nilai dasar kolaborasi antar stakeholders memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kinerja <i>stakeholders</i> dalam mencapai tujuan kolaboratif.</p>
		<p><i>Growth:</i> 6</p>	<p>Perkembangan kolaborasi antar stakeholders dapat berkelanjutan dengan baik.</p>
4	Mekanisme Evaluasi dan Perbaikan	<p><i>Urgency:</i> 8</p>	<p>Mekanisme evaluasi dan perbaikan memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu <i>stakeholders</i> mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul dalam kolaborasi dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.</p>
		<p><i>Seriousness:</i> 8</p>	<p>Mekanisme evaluasi dan perbaikan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan adaptabilitas, kualitas, dan efektivitas kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam jangka panjang.</p>
		<p><i>Growth:</i> 8</p>	<p>Pertumbuhan efek mekanisme evaluasi dan perbaikan dapat berkembang secara berkelanjutan dengan adanya pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja kolaboratif.</p>
Proses Kolaborasi			
1	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	<p><i>Urgency:</i> 8</p>	<p>FGD memiliki urgensi yang tinggi karena memungkinkan para <i>stakeholders</i> untuk berdiskusi dan memberikan masukan secara langsung, sehingga mempercepat proses pemahaman bersama dan merumuskan langkah-langkah kolaboratif.</p>
		<p><i>Seriousness:</i> 9</p>	<p>FGD memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena merupakan forum penting untuk mengumpulkan perspektif dan pengetahuan dari berbagai <i>stakeholders</i>, yang akan mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil dalam</p>

			penyediaan bantuan kesehatan dan sosial.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek FGD dapat berkembang dalam jangka pendek dengan meningkatkan pemahaman bersama dan koordinasi antar stakeholders, namun perlu diikuti dengan tindakan konkret untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
2	Forum Komunikasi Berjenjang	<i>Urgency:</i> 7	Pembentukan forum komunikasi berjenjang memiliki urgensi yang cukup tinggi karena memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara Bapenda, RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan untuk berbagi informasi dan aspirasi.
		<i>Seriousness:</i> 8	Forum komunikasi berjenjang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antar stakeholders, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek forum komunikasi berjenjang dapat berkembang dalam jangka panjang dengan memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antara stakeholders, namun perlu diikuti dengan upaya nyata dalam menjaga kontinuitas forum dan implementasi hasil diskusi.
3	Stimulasi Kerja Sama	<i>Urgency:</i> 7	Stimulasi kerja sama memiliki urgensi yang cukup tinggi karena membutuhkan dorongan aktif dari Bapenda untuk menciptakan atmosfer kolaboratif yang proaktif di antara <i>stakeholders</i> terkait.
		<i>Seriousness:</i> 8	Stimulasi kerja sama memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi komitmen dan partisipasi <i>stakeholders</i> dalam mendukung kebijakan relaksasi pemungutan PBB secara efektif.

		<i>Growth:</i> 9	Pertumbuhan efek stimulasi kerja sama dapat berkembang dalam jangka panjang dengan meningkatkan keterlibatan <i>stakeholders</i> , namun perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk memelihara dan memperkuat kerja sama tersebut.
4	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	<i>Urgency:</i> 9	<i>Monitoring</i> dan evaluasi memiliki urgensi yang tinggi karena penting untuk memastikan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.
		<i>Seriousness:</i> 9	<i>Monitoring</i> dan evaluasi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena memungkinkan identifikasi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan pencapaian target penerimaan PBB.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan efek <i>monitoring</i> dan evaluasi dapat berkembang dalam jangka panjang dengan memastikan adanya pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja kolaboratif yang berkelanjutan.

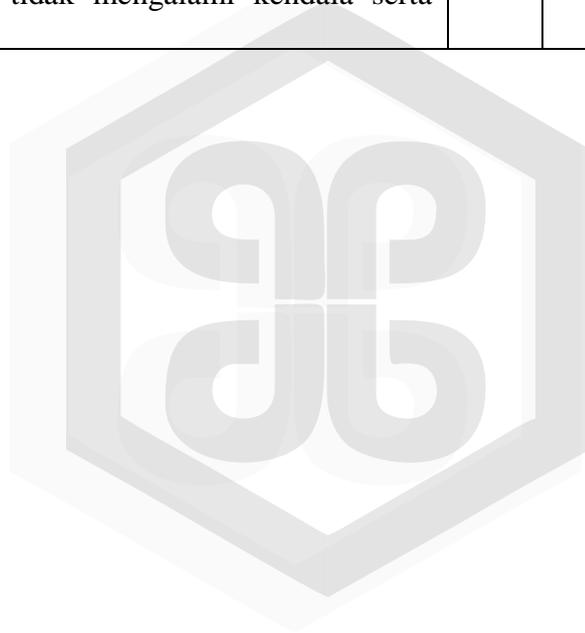


KUESIONER

- I. Jenis Kelamin :
- II. Usia :
- III. Pekerjaan :
- IV. Pendidikan terakhir :

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi sejak pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi					
2	Apabila saya ingin membayar PBB, pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasinya telah secara otomatis berlaku tanpa harus mengajukan ke Kantor Bapenda Kota Bekasi.					
3	Kebijakan tersebut tersebut telah tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).					
4	Saya merasakan manfaat dari adanya kebijakan relaksasi pemungutan PBB tersebut.					
5	Aparatur Bapenda Kota Bekasi, Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga turut berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan-masukan, saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.					
6	Apabila saya mengurus berkas permohonan pelayanan ke Kelurahan dan Kecamatan dipersyaratkan wajib lunas PBB tahun terakhir.					
7	Masyarakat maupun tokoh masyarakat yang berada di sekitar wilayah saya proaktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan relaksasi pemungutan PBB.					
8	Kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasinya dan mengedepankan azas keadilan.					
9	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi					

	<p>pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut menghimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minimal tahun terakhir ketika akan mengajukan permohonan pelayanan publik di Kota Bekasi.</p>					
10	<p>Apabila saya membutuhkan informasi terkait kebijakan tersebut, tidak mengalami kendala serta aksesnya mudah.</p>					



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA



PEDOMAN WAWANCARA

- I. Jadwal wawancara :
 Hari / Tanggal :
- II. Identitas informan :
 • Jenis kelamin :
- Usia :
- Pendidikan terakhir :

A. RELAKSASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO	DIMENSI	KEY INFORMANT						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Menurut Anda apakah kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi sudah tepat sasaran dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?					√		√
2	Menurut Anda, apakah kenaikan pembayaran PBB pada tahun-tahun mendatang setelah berakhirnya masa pandemi tersebut ada kemungkinan terjadi?						√	√

B. COLLABORATIVE GOVERNANCE

NO	DIMENSI	KEY INFORMANT						
		1	2	3	4	5	6	7
KONDISI AWAL								
3	Menurut Anda apa yang melatarbelakangi terbentuknya <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi?			√			√	√
KEPEMIMPINAN FASILITATIF								
4	Menurut Anda, siapa yang berperan sebagai kepemimpinan fasilitatif dan bagaimana bentuk kepemimpinan fasilitatif yang diberikan dalam <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi?	√			√			√
DESAIN INSTITUSIONAL								
5	Bagaimanakah dasar hukum dalam atau regulasi dalam <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi					√	√	

	wajib pajak terdampak COVID-19 tersebut serta apakah terdapat <i>Standart Operating Procedure (SOP)</i> -nya?							
PROSES KOLABORASI								
6	Bagaimanakah pola komunikasi <i>collaborative governance</i> yang dilakukan antar <i>stakeholders</i> terkait tersebut dan ketersediaan sumber daya yang ada?						√	√
7	Menurut Anda, bagaimana Bapenda Kota Bekasi membangun kepercayaan dengan <i>stakeholders</i> yang tergabung dalam <i>collaborative governance</i> tersebut?				√			
8	Menurut Anda, bagaimana menyelaraskan tujuan bersama diantara <i>stakeholders</i> dan adakah keterbukaan informasi dalam <i>collaborative governance</i> tersebut?		√		√			
9	Menurut Anda, sejauhmana kontribusi dan peran <i>stakeholders</i> dalam mencapai tujuan <i>collaborative governance</i> tersebut?	√		√				
10	Menurut Anda, bagaimana hasil yang diperoleh dan rencana apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil tersebut?	√	√		√			

UJI RELIABILITAS FULL SAMPLE (62 Responden)

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	62	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	7



Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	3.1452	.98923	62
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	3.7258	.90842	62
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	4.1935	1.00554	62
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	3.3871	.98105	62
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	3.0484	.87642	62
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	3.8226	.77933	62
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	3.5161	1.15577	62

J A K A R T A
J A K A R T A

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	21.6935	13.396	.280	.706
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	21.1129	12.495	.479	.656
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	20.6452	11.380	.591	.622
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	21.4516	12.383	.442	.664
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	21.7903	14.070	.238	.712
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	21.0161	11.918	.720	.608
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	21.3226	12.845	.268	.719

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24.8387	16.400	4.04967	7

RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	62	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	3.3710	1.10489	62
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	3.2258	1.09274	62
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	3.6129	1.35930	62

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	6.8387	4.990	.383	.781
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	6.9839	4.246	.591	.555
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	6.5968	3.130	.650	.457

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
10.2097	8.103	2.84655	3

UJI VALIDITAS FULL SAMPLE (62 Responden)

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Correlations

		Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik	Collaborative Governance	
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .075 62	.227 .075 62	.350** .005 62	.397** .001 62	.067 .603 62	.289 .023 62	-.181 .158 62	.497** .000 62
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.227 .075 62	1 .031 62	.274** .031 62	.231 .070 62	.223 .082 62	.602** .000 62	.262** .040 62	.643** .000 62
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.350** .005 62	.274** .031 62	1 .001 62	.421** .001 62	.194 .131 62	.505** .000 62	.364** .004 62	.740** .000 62
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.397** .001 62	.231 .070 62	.421** .001 62	1 .073 62	.073 .572 62	.391** .002 62	.139 .281 62	.627** .000 62
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.067 .603 62	.223 .082 62	.194 .131 62	.073 .572 62	1 .073 62	.325* .010 62	.088 .495 62	.436** .000 62
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .023 62	.602** .000 62	.505** .000 62	.391** .002 62	.325* .010 62	1 .010 62	.413** .001 62	.806** .000 62
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.181 .158 62	.262** .040 62	.364** .004 62	.139 .281 62	.088 .495 62	.413** .001 62	1 62	.522** .000 62
Collaborative_Governance	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.497** .000 62	.643** .000 62	.740** .000 62	.627** .000 62	.436** .000 62	.806** .000 62	.522** .000 62	1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Correlations

		Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.		Kebijakan tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	Relaksasi_Pemungutan_Pajak
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	Pearson Correlation	1	.296	.392**	.689**	
	Sig. (2-tailed)		.019	.002	.000	
	N	62	62	62	62	
Kebijakan tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	Pearson Correlation	.296	1	.656**	.812**	
	Sig. (2-tailed)	.019		.000	.000	
	N	62	62	62	62	
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	Pearson Correlation	.392**	.656**	1	.881**	
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	
	N	62	62	62	62	
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	Pearson Correlation	.689**	.812**	.881**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		
	N	62	62	62	62	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

FREKUENSI JAWABAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Setuju	22	35.5	35.5	37.1
	Netral	7	11.3	11.3	48.4
	Tidak Setuju	31	50.0	50.0	98.4
	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
Tidak Setuju	7	11.3	11.3	12.9
Netral	9	14.5	14.5	27.4
Setuju	36	58.1	58.1	85.5
Sangat Setuju	9	14.5	14.5	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	9.7	9.7	9.7
Netral	8	12.9	12.9	22.6
Tidak Setuju	16	25.8	25.8	48.4
Sangat Tidak Setuju	32	51.6	51.6	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	1	1.6	1.6	1.6
Setuju	13	21.0	21.0	22.6
Netral	15	24.2	24.2	46.8
Tidak Setuju	27	43.5	43.5	90.3
Sangat Tidak Setuju	6	9.7	9.7	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	3.2	3.2	3.2
	Tidak Setuju	15	24.2	24.2	27.4
	Netral	24	38.7	38.7	66.1
	Setuju	20	32.3	32.3	98.4
	Sangat Setuju	1	1.6	1.6	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	5	8.1	8.1	9.7
	Netral	4	6.5	6.5	16.1
	Setuju	46	74.2	74.2	90.3
	Sangat Setuju	6	9.7	9.7	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	19	30.6	30.6	32.3
	Setuju	31	50.0	50.0	82.3
	Sangat Setuju	11	17.7	17.7	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	20	32.3	32.3	33.9
	Netral	3	4.8	4.8	38.7
	Setuju	31	50.0	50.0	88.7
	Sangat Setuju	7	11.3	11.3	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	3	4.8	4.8	4.8
Setuju	17	27.4	27.4	32.3
Netral	10	16.1	16.1	48.4
Tidak Setuju	27	43.5	43.5	91.9
Sangat Tidak Setuju	5	8.1	8.1	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	3	4.8	4.8	4.8
Setuju	16	25.8	25.8	30.6
Netral	7	11.3	11.3	41.9
Tidak Setuju	12	19.4	19.4	61.3
Sangat Tidak Setuju	24	38.7	38.7	100.0
Total	62	100.0	100.0	

**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

DESCRIPTIVE STATISTICS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	62	1.00	5.00	3.3710	1.10489
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	62	1.00	5.00	3.2258	1.09274
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	62	1.00	5.00	3.6129	1.35930
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	62	1.33	4.67	3.4029	.94848
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	62	1.00	5.00	3.1452	.98923
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	62	1.00	5.00	3.7258	.90842
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	62	2.00	5.00	4.1935	1.00554
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	62	1.00	5.00	3.3871	.98105
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	62	1.00	5.00	3.0484	.87642
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	62	1.00	5.00	3.8226	.77933
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	62	1.00	5.00	3.5161	1.15577
Collaborative_Governance	62	1.43	4.29	3.5479	.57872
Valid N (listwise)	62				

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.50473889
Most Extreme Differences	Absolute		.117
	Positive		.075
	Negative		-.117
Test Statistic			.117
Asymp. Sig. (2-tailed)			.036 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.346 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.333
		Upper Bound	.358

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Collaborative_Governance ^b	.	Enter

- Dependent Variable: ABSRESID
- All requested variables entered.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.833	1.066		.781	.438
	Collaborative_Governance	.051	.042	.153	1.200	.235

- Dependent Variable: ABSRESID

REGRESI SEDERHANA

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	10.2097	2.84655	62
Collaborative_Governance	24.8387	4.04967	62

Correlations

		Relaksasi_Pemungutan_Pajak	Collaborative_Governance
Pearson Correlation	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	1.000	.475
	Collaborative_Governance	.475	1.000
Sig. (1-tailed)	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	.	.000
	Collaborative_Governance	.000	.
N	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	62	62
	Collaborative_Governance	62	62

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Collaborative_Governance ^b	.	Enter

a. Dependent Variable:
Relaksasi_Pemungutan_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	.213	2.52553	1.908

a. Predictors: (Constant), Collaborative_Governance

b. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.577	1	111.577	17.493	.000 ^b
	Residual	382.697	60	6.378		
	Total	494.274	61			

a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

b. Predictors: (Constant), Collaborative_Governance

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.914	2.009		.953	.344					
	Collaborative_Governance	.334	.080	.475	4.183	.000	.475	.475	.475	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Collaborative_Governance
1	1	1.987	1.000	.01	.01
	2	.013	12.448	.99	.99

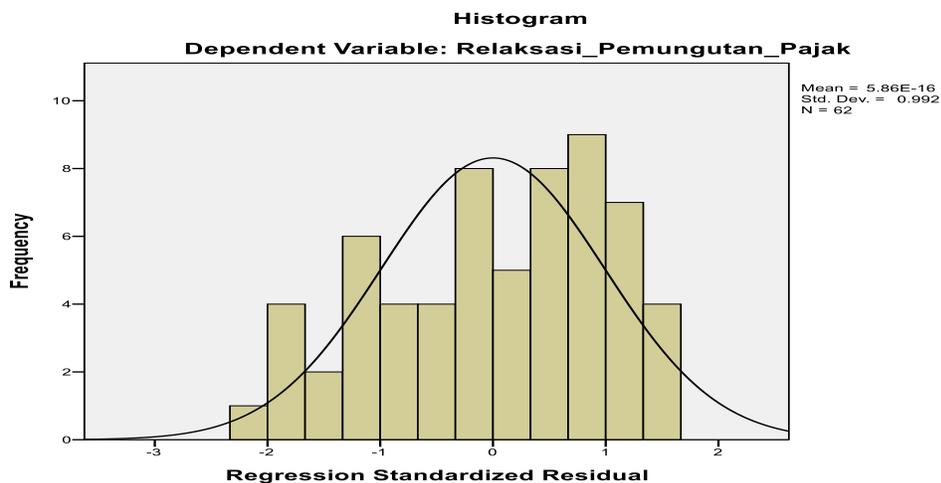
a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.2540	11.9334	10.2097	1.35246	62
Std. Predicted Value	-3.664	1.274	.000	1.000	62
Standard Error of Predicted Value	.321	1.227	.417	.181	62
Adjusted Predicted Value	5.3326	11.9304	10.2106	1.35554	62
Residual	-5.59751	4.07042	.00000	2.50474	62
Std. Residual	-2.216	1.612	.000	.992	62
Stud. Residual	-2.236	1.625	.000	1.003	62
Deleted Residual	-5.69708	4.14011	-.00090	2.56473	62
Stud. Deleted Residual	-2.316	1.649	-.003	1.013	62
Mahal. Distance	.002	13.426	.984	2.352	62
Cook's Distance	.000	.096	.012	.015	62
Centered Leverage Value	.000	.220	.016	.039	62

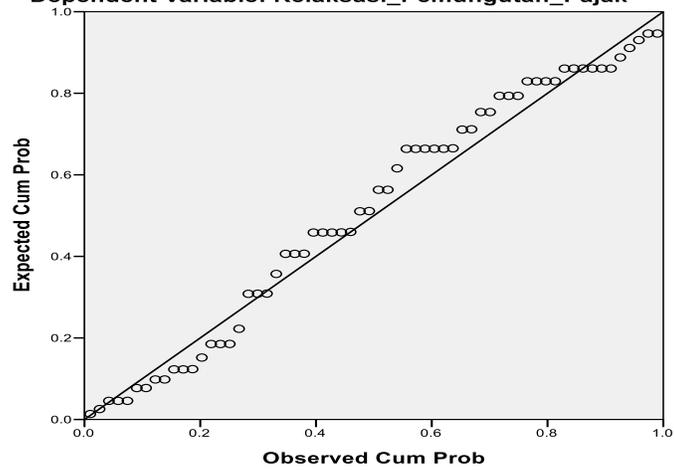
a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Charts



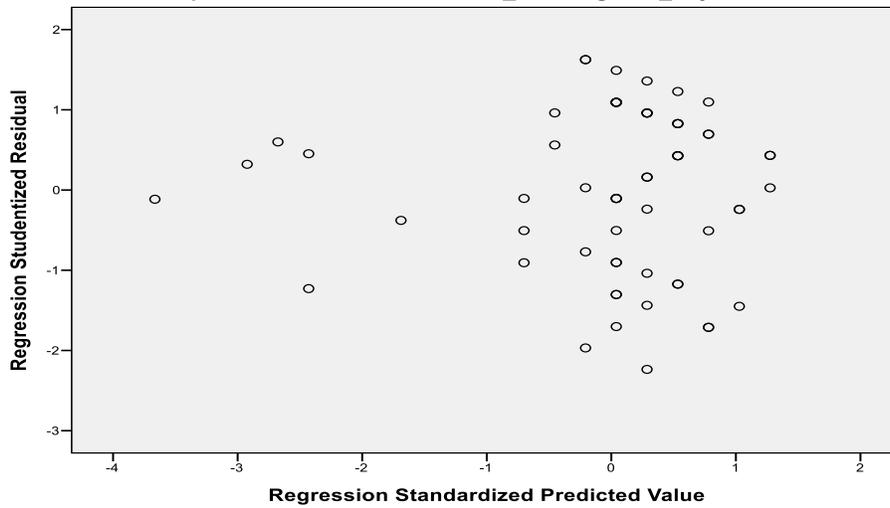
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak



Tabel 4.14.
Alasan Pemilihan Skor USG

No	Alternatif	Nilai USG	Alasan
Kondisi Awal			
1	Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat	<i>Urgency:</i> 8	Sosialisasi kepada tokoh masyarakat memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB.
		<i>Seriousness:</i> 9	Sosialisasi kepada tokoh masyarakat memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap pentingnya pembayaran PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada tokoh masyarakat dapat menjadi lambat dalam jangka pendek, tetapi memiliki potensi untuk berkembang secara bertahap seiring waktu.
2	Sosialisasi kepada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya	<i>Urgency:</i> 7	Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya memiliki urgensi yang cukup tinggi karena mereka dapat menjadi agen penghubung yang efektif antara masyarakat dan Bapenda dalam hal pembayaran PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan dari pihak Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan program pembayaran PBB.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah lainnya dapat membutuhkan waktu untuk berkembang, tetapi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.
3	Sosialisasi kepada Bank Persepsi	<i>Urgency:</i> 7	Sosialisasi kepada bank persepsi (BJB, BTN, BRI, BNI'46, Bank

			Mandiri, PT Pos Indonesia, dsb) memiliki urgensi yang cukup tinggi mengingat perannya sebagai penerima setoran pembayaran PBB dari wajib pajak.
		<i>Seriousness:</i> 7	Sosialisasi kepada bank persepsi memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi mengingat tugas dan fungsinya yang dapat meningkatkan capaian realisasi atas target PBB.
		<i>Growth:</i> 9	Pertumbuhan efek sosialisasi kepada bank persepsi memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan optimalisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi.
4	Edukasi Penggunaan Media Pembayaran <i>Online</i>	<i>Urgency:</i> 9	Edukasi penggunaan media pembayaran online memiliki urgensi yang tinggi karena mendorong penggunaan metode pembayaran yang efisien dan mudah diakses oleh wajib pajak.
		<i>Seriousness:</i> 8	Edukasi penggunaan media pembayaran online memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan keterlibatan wajib pajak dalam pembayaran PBB dan mempermudah proses administrasi.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan penggunaan media pembayaran <i>online</i> memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena perkembangan teknologi digital dan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan metode pembayaran yang lebih praktis.
4	Edukasi Penggunaan Aplikasi <i>Video Conference</i>	<i>Urgency:</i> 8	Edukasi penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memberikan alternatif komunikasi yang efektif dalam situasi yang membatasi pertemuan tatap muka.
		<i>Seriousness:</i> 7	Edukasi penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat meningkatkan aksesibilitas dan

			efisiensi dalam memberikan informasi kepada wajib pajak.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan penggunaan aplikasi <i>video conference</i> memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus berlangsung.
5	Fasilitas Pembayaran <i>Offline</i>	<i>Urgency:</i> 7	Fasilitasi pembayaran <i>offline</i> memiliki urgensi yang cukup tinggi karena memberikan solusi bagi wajib pajak yang tidak memiliki akses ke pembayaran <i>online</i> .
		<i>Seriousness:</i> 6	Fasilitasi pembayaran <i>offline</i> memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat memberikan pilihan alternatif pembayaran kepada wajib pajak dan memperluas cakupan penerimaan PBB.
		<i>Growth:</i> 5	Pertumbuhan efek fasilitasi pembayaran <i>offline</i> cenderung stabil, dengan sedikit kemungkinan perkembangan yang signifikan.
6	Upaya Jemput Bola	<i>Urgency:</i> 9	Upaya jemput bola memiliki urgensi yang tinggi karena dapat langsung meningkatkan penerimaan PBB dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum melunasi pembayaran.
		<i>Seriousness:</i> 10	Upaya jemput bola memiliki tingkat keseriusan yang sangat tinggi karena dapat memberikan tekanan langsung kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek upaya jemput bola cenderung stabil dalam jangka pendek, tetapi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan kepatuhan pajak dalam jangka panjang.
Kepemimpinan Fasilitatif			
1	Mediasi Komunikasi	<i>Urgency:</i> 7	Mediasi komunikasi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memfasilitasi dialog dan pertemuan antara <i>stakeholders</i> untuk

			mencapai pemahaman dan kerja sama yang baik dalam melaksanakan relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Mediasi komunikasi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan relaksasi pemungutan PBB melalui pemahaman dan kerja sama yang baik antara pihak terkait.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek mediasi komunikasi dapat berkembang secara bertahap seiring dengan memperkuat hubungan dan kerja sama antara <i>stakeholders</i> dalam jangka panjang.
2	Kolaborasi dengan OPD Lainnya	<i>Urgency:</i> 8	Kolaborasi dengan OPD lainnya memiliki urgensi yang tinggi karena memperkuat koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 9	Kolaborasi dengan OPD lainnya memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memberikan dukungan dan efisiensi dalam melaksanakan relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek kolaborasi dengan OPD lainnya dapat memberikan potensi pertumbuhan yang tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.
3	Melibatkan Tokoh Masyarakat	<i>Urgency:</i> 9	Melibatkan tokoh masyarakat memiliki urgensi yang tinggi karena mereka dapat membantu menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dari relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Seriousness:</i> 8	Melibatkan tokoh masyarakat memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi sikap dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan efektivitas

			sosialisasi relaksasi pemungutan PBB.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek melibatkan tokoh masyarakat dapat berkembang secara bertahap seiring dengan peningkatan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.
4	Melibatkan Bank Persepsi	<i>Urgency:</i> 7	Melibatkan bank persepsi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memfasilitasi pembayaran PBB, memberikan informasi, dan memastikan ketersediaan fasilitas pembayaran yang mudah diakses oleh masyarakat.
		<i>Seriousness:</i> 8	Melibatkan bank persepsi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran PBB serta memperluas cakupan penerimaan.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek melibatkan bank persepsi dapat berkembang secara bertahap seiring dengan meningkatnya aksesibilitas dan partisipasi wajib pajak dalam menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan.
5	Melibatkan Media Massa Setempat	<i>Urgency:</i> 6	Melibatkan media massa setempat memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat menyampaikan informasi tentang relaksasi pemungutan PBB kepada masyarakat secara luas dan cepat.
		<i>Seriousness:</i> 7	Melibatkan media massa setempat memiliki tingkat keseriusan yang cukup tinggi karena dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi wajib pajak terdampak COVID-19.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek melibatkan media massa setempat dapat berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam jangka pendek.
Desain Institusional			

1	Pembentukan Memorandum of Understanding (MoU)	Urgency: 9	Pembentukan MoU memiliki urgensi yang tinggi karena dapat mengatur kerja sama kolaboratif antara <i>stakeholders</i> secara formal dan jelas dalam relaksasi pemungutan PBB.
		Seriousness: 9	Pembentukan MoU memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memberikan landasan hukum dan mengikat bagi semua pihak terkait, sehingga memastikan komitmen dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan kolaboratif.
		Growth: 8	Pertumbuhan efek pembentukan MoU dapat berkembang dalam jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kualitas kolaborasi antar <i>stakeholders</i> .
2	Definisi Tugas dan Fungsi	Urgency: 9	Definisi tugas dan fungsi memiliki urgensi yang tinggi karena dapat mengklarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB, menghindari tumpang tindih dan kebingungan.
		Seriousness: 9	Definisi tugas dan fungsi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan koordinasi antar <i>stakeholders</i> dalam pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.
		Growth: 8	Pertumbuhan efek definisi tugas dan fungsi dapat berkembang seiring dengan peningkatan efektivitas dan kejelasan dalam peran serta tanggung jawab masing-masing <i>stakeholder</i> .
3	Nilai-Nilai Dasar	Urgency: 8	Pemahaman akan nilai-nilai dasar kolaborasi memiliki urgensi yang cukup tinggi karena dapat memberikan motivasi positif bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan relaksasi pemungutan PBB.

		<p><i>Seriousness:</i> 9</p>	<p>Pemahaman nilai-nilai dasar kolaborasi antar stakeholders memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kinerja <i>stakeholders</i> dalam mencapai tujuan kolaboratif.</p>
		<p><i>Growth:</i> 6</p>	<p>Perkembangan kolaborasi antar stakeholders dapat berkelanjutan dengan baik.</p>
4	Mekanisme Evaluasi dan Perbaikan	<p><i>Urgency:</i> 8</p>	<p>Mekanisme evaluasi dan perbaikan memiliki urgensi yang tinggi karena dapat membantu <i>stakeholders</i> mengidentifikasi kendala atau masalah yang muncul dalam kolaborasi dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.</p>
		<p><i>Seriousness:</i> 8</p>	<p>Mekanisme evaluasi dan perbaikan memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat meningkatkan adaptabilitas, kualitas, dan efektivitas kolaborasi antar <i>stakeholders</i> dalam jangka panjang.</p>
		<p><i>Growth:</i> 8</p>	<p>Pertumbuhan efek mekanisme evaluasi dan perbaikan dapat berkembang secara berkelanjutan dengan adanya pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja kolaboratif.</p>
Proses Kolaborasi			
1	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	<p><i>Urgency:</i> 8</p>	<p>FGD memiliki urgensi yang tinggi karena memungkinkan para <i>stakeholders</i> untuk berdiskusi dan memberikan masukan secara langsung, sehingga mempercepat proses pemahaman bersama dan merumuskan langkah-langkah kolaboratif.</p>
		<p><i>Seriousness:</i> 9</p>	<p>FGD memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena merupakan forum penting untuk mengumpulkan perspektif dan pengetahuan dari berbagai <i>stakeholders</i>, yang akan mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang diambil dalam</p>

			penyediaan bantuan kesehatan dan sosial.
		<i>Growth:</i> 6	Pertumbuhan efek FGD dapat berkembang dalam jangka pendek dengan meningkatkan pemahaman bersama dan koordinasi antar stakeholders, namun perlu diikuti dengan tindakan konkret untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.
2	Forum Komunikasi Berjenjang	<i>Urgency:</i> 7	Pembentukan forum komunikasi berjenjang memiliki urgensi yang cukup tinggi karena memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antara Bapenda, RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan untuk berbagi informasi dan aspirasi.
		<i>Seriousness:</i> 8	Forum komunikasi berjenjang memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antar stakeholders, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
		<i>Growth:</i> 7	Pertumbuhan efek forum komunikasi berjenjang dapat berkembang dalam jangka panjang dengan memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antara stakeholders, namun perlu diikuti dengan upaya nyata dalam menjaga kontinuitas forum dan implementasi hasil diskusi.
3	Stimulasi Kerja Sama	<i>Urgency:</i> 7	Stimulasi kerja sama memiliki urgensi yang cukup tinggi karena membutuhkan dorongan aktif dari Bapenda untuk menciptakan atmosfer kolaboratif yang proaktif di antara <i>stakeholders</i> terkait.
		<i>Seriousness:</i> 8	Stimulasi kerja sama memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena dapat mempengaruhi komitmen dan partisipasi <i>stakeholders</i> dalam mendukung kebijakan relaksasi pemungutan PBB secara efektif.

		<i>Growth:</i> 9	Pertumbuhan efek stimulasi kerja sama dapat berkembang dalam jangka panjang dengan meningkatkan keterlibatan <i>stakeholders</i> , namun perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk memelihara dan memperkuat kerja sama tersebut.
4	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi	<i>Urgency:</i> 9	<i>Monitoring</i> dan evaluasi memiliki urgensi yang tinggi karena penting untuk memastikan bahwa <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.
		<i>Seriousness:</i> 9	<i>Monitoring</i> dan evaluasi memiliki tingkat keseriusan yang tinggi karena memungkinkan identifikasi perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan pencapaian target penerimaan PBB.
		<i>Growth:</i> 8	Pertumbuhan efek <i>monitoring</i> dan evaluasi dapat berkembang dalam jangka panjang dengan memastikan adanya pembelajaran organisasi dan peningkatan kinerja kolaboratif yang berkelanjutan.

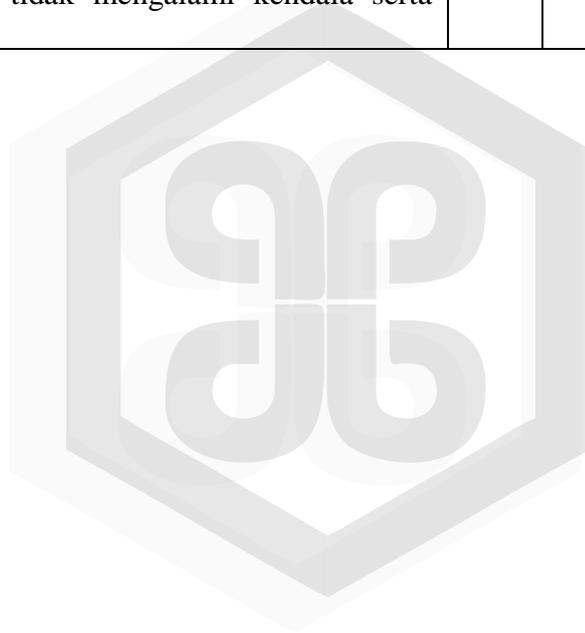


KUESIONER

- I. Jenis Kelamin :
- II. Usia :
- III. Pekerjaan :
- IV. Pendidikan terakhir :

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya mengetahui kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi sejak pertama kali diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi					
2	Apabila saya ingin membayar PBB, pengurangan ketetapan pokok dan penghapusan sanksi administrasinya telah secara otomatis berlaku tanpa harus mengajukan ke Kantor Bapenda Kota Bekasi.					
3	Kebijakan tersebut tersebut telah tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).					
4	Saya merasakan manfaat dari adanya kebijakan relaksasi pemungutan PBB tersebut.					
5	Aparatur Bapenda Kota Bekasi, Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga turut berpartisipasi dalam bentuk memberikan masukan-masukan, saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.					
6	Apabila saya mengurus berkas permohonan pelayanan ke Kelurahan dan Kecamatan dipersyaratkan wajib lunas PBB tahun terakhir.					
7	Masyarakat maupun tokoh masyarakat yang berada di sekitar wilayah saya proaktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan relaksasi pemungutan PBB.					
8	Kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasinya dan mengedepankan azas keadilan.					
9	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi					

	<p>pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut menghimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minimal tahun terakhir ketika akan mengajukan permohonan pelayanan publik di Kota Bekasi.</p>					
10	<p>Apabila saya membutuhkan informasi terkait kebijakan tersebut, tidak mengalami kendala serta aksesnya mudah.</p>					



POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA



PEDOMAN WAWANCARA

- I. Jadwal wawancara :
 Hari / Tanggal :
- II. Identitas informan :
 • Jenis kelamin :
- Usia :
- Pendidikan terakhir :

A. RELAKSASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO	DIMENSI	KEY INFORMANT						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Menurut Anda apakah kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi sudah tepat sasaran dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku?					√		√
2	Menurut Anda, apakah kenaikan pembayaran PBB pada tahun-tahun mendatang setelah berakhirnya masa pandemi tersebut ada kemungkinan terjadi?						√	√

B. COLLABORATIVE GOVERNANCE

NO	DIMENSI	KEY INFORMANT						
		1	2	3	4	5	6	7
KONDISI AWAL								
3	Menurut Anda apa yang melatarbelakangi terbentuknya <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi?			√			√	√
KEPEMIMPINAN FASILITATIF								
4	Menurut Anda, siapa yang berperan sebagai kepemimpinan fasilitatif dan bagaimana bentuk kepemimpinan fasilitatif yang diberikan dalam <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi?	√			√			√
DESAIN INSTITUSIONAL								
5	Bagaimanakah dasar hukum dalam atau regulasi dalam <i>collaborative governance</i> dalam relaksasi pemungutan PBB bagi					√	√	

	wajib pajak terdampak COVID-19 tersebut serta apakah terdapat <i>Standart Operating Procedure (SOP)</i> -nya?							
PROSES KOLABORASI								
6	Bagaimanakah pola komunikasi <i>collaborative governance</i> yang dilakukan antar <i>stakeholders</i> terkait tersebut dan ketersediaan sumber daya yang ada?						√	√
7	Menurut Anda, bagaimana Bapenda Kota Bekasi membangun kepercayaan dengan <i>stakeholders</i> yang tergabung dalam <i>collaborative governance</i> tersebut?				√			
8	Menurut Anda, bagaimana menyelaraskan tujuan bersama diantara <i>stakeholders</i> dan adakah keterbukaan informasi dalam <i>collaborative governance</i> tersebut?		√		√			
9	Menurut Anda, sejauhmana kontribusi dan peran <i>stakeholders</i> dalam mencapai tujuan <i>collaborative governance</i> tersebut?	√		√				
10	Menurut Anda, bagaimana hasil yang diperoleh dan rencana apa yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil tersebut?	√	√		√			

UJI RELIABILITAS FULL SAMPLE (62 Responden)

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	62	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	7



Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	3.1452	.98923	62
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	3.7258	.90842	62
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	4.1935	1.00554	62
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	3.3871	.98105	62
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	3.0484	.87642	62
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	3.8226	.77933	62
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	3.5161	1.15577	62

J A K A R T A
J A K A R T A

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	21.6935	13.396	.280	.706
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	21.1129	12.495	.479	.656
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	20.6452	11.380	.591	.622
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	21.4516	12.383	.442	.664
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	21.7903	14.070	.238	.712
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	21.0161	11.918	.720	.608
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	21.3226	12.845	.268	.719

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
24.8387	16.400	4.04967	7

RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	62	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	62	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.711	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	3.3710	1.10489	62
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	3.2258	1.09274	62
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	3.6129	1.35930	62

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	6.8387	4.990	.383	.781
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	6.9839	4.246	.591	.555
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	6.5968	3.130	.650	.457

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
10.2097	8.103	2.84655	3

UJI VALIDITAS FULL SAMPLE (62 Responden)

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Correlations

		Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan PBB bagi wajib pajak	Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyarkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik	Collaborative Governance	
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .075 62	.227 .075 62	.350** .005 62	.397** .001 62	.067 .603 62	.289 .023 62	-.181 .158 62	.497** .000 62
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.227 .075 62	1 .031 62	.274* .031 62	.231 .070 62	.223 .082 62	.602** .000 62	.262** .040 62	.643** .000 62
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyarkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.350** .005 62	.274* .031 62	1 .001 62	.421** .001 62	.194 .131 62	.505** .000 62	.364** .004 62	.740** .000 62
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.397** .001 62	.231 .070 62	.421** .001 62	1 .073 62	.073 .572 62	.391** .002 62	.139 .281 62	.627** .000 62
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.067 .603 62	.223 .082 62	.194 .131 62	.073 .572 62	1 .073 62	.325* .010 62	.088 .495 62	.436** .000 62
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.289 .023 62	.602** .000 62	.505** .000 62	.391** .002 62	.325* .010 62	1 .010 62	.413** .001 62	.806** .000 62
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	-.181 .158 62	.262* .040 62	.364** .004 62	.139 .281 62	.088 .495 62	.413** .001 62	1 62	.522** .000 62
Collaborative_Governance	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.497** .000 62	.643** .000 62	.740** .000 62	.627** .000 62	.436** .000 62	.806** .000 62	.522** .000 62	1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Correlations

		Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.		Kebijakan tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	Relaksasi_Pemungutan_Pajak
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	Pearson Correlation	1	.296	.392**	.689**	
	Sig. (2-tailed)		.019	.002	.000	
	N	62	62	62	62	
Kebijakan tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	Pearson Correlation	.296	1	.656**	.812**	
	Sig. (2-tailed)	.019		.000	.000	
	N	62	62	62	62	
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	Pearson Correlation	.392**	.656**	1	.881**	
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000	
	N	62	62	62	62	
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	Pearson Correlation	.689**	.812**	.881**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		
	N	62	62	62	62	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

FREKUENSI JAWABAN

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	1	1.6	1.6	1.6
Setuju	22	35.5	35.5	37.1
Netral	7	11.3	11.3	48.4
Tidak Setuju	31	50.0	50.0	98.4
Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
Tidak Setuju	7	11.3	11.3	12.9
Netral	9	14.5	14.5	27.4
Setuju	36	58.1	58.1	85.5
Sangat Setuju	9	14.5	14.5	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	6	9.7	9.7	9.7
Netral	8	12.9	12.9	22.6
Tidak Setuju	16	25.8	25.8	48.4
Sangat Tidak Setuju	32	51.6	51.6	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	1	1.6	1.6	1.6
Setuju	13	21.0	21.0	22.6
Netral	15	24.2	24.2	46.8
Tidak Setuju	27	43.5	43.5	90.3
Sangat Tidak Setuju	6	9.7	9.7	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	3.2	3.2	3.2
	Tidak Setuju	15	24.2	24.2	27.4
	Netral	24	38.7	38.7	66.1
	Setuju	20	32.3	32.3	98.4
	Sangat Setuju	1	1.6	1.6	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	5	8.1	8.1	9.7
	Netral	4	6.5	6.5	16.1
	Setuju	46	74.2	74.2	90.3
	Sangat Setuju	6	9.7	9.7	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	19	30.6	30.6	32.3
	Setuju	31	50.0	50.0	82.3
	Sangat Setuju	11	17.7	17.7	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

RELAKSASI PEMUNGUTAN PBB

Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	1.6	1.6	1.6
	Tidak Setuju	20	32.3	32.3	33.9
	Netral	3	4.8	4.8	38.7
	Setuju	31	50.0	50.0	88.7
	Sangat Setuju	7	11.3	11.3	100.0
	Total	62	100.0	100.0	

Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	3	4.8	4.8	4.8
Setuju	17	27.4	27.4	32.3
Netral	10	16.1	16.1	48.4
Tidak Setuju	27	43.5	43.5	91.9
Sangat Tidak Setuju	5	8.1	8.1	100.0
Total	62	100.0	100.0	

Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Setuju	3	4.8	4.8	4.8
Setuju	16	25.8	25.8	30.6
Netral	7	11.3	11.3	41.9
Tidak Setuju	12	19.4	19.4	61.3
Sangat Tidak Setuju	24	38.7	38.7	100.0
Total	62	100.0	100.0	

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DESCRIPTIVE STATISTICS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tersedianya peraturan (regulasi) mengenai relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi dan telah sesuai dengan penerapannya.	62	1.00	5.00	3.3710	1.10489
Kebijakan tersebut tersebut dirasa telah adil dan tepat sasaran kepada masyarakat (wajib pajak).	62	1.00	5.00	3.2258	1.09274
Saya menyadari bahwa relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 merupakan salah satu bentuk pinjaman dari pemerintah untuk masyarakatnya serta adakalanya setelah pandemi COVID-19 berakhir bisa terjadi pembebanan pajak yang lebih tinggi.	62	1.00	5.00	3.6129	1.35930
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	62	1.33	4.67	3.4029	.94848
Saya telah mengetahui kemanfaatan dari membayar PBB yang diperoleh kembali oleh masyarakat dari pemerintah Kota Bekasi, salah satunya dalam bentuk pelayanan urusan dasar.	62	1.00	5.00	3.1452	.98923
Aparatur Bapenda Kota Bekasi berperan aktif dalam membangun kerjasama serta mengarahkan Kelurahan, Kecamatan, tokoh masyarakat setempat, media massa maupun warga untuk saling menginformasikan berbagai ketentuan dalam relaksasi pemungutan PBB bagi wajib p	62	1.00	5.00	3.7258	.90842
Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kota Bekasi proaktif mendukung kesuksesan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 dengan ikut mempersyaratkan masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu minima	62	2.00	5.00	4.1935	1.00554
Bapenda Kota Bekasi senantiasa menampung segala aspirasi serta masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan proses pelaksanaan kebijakan tersebut baik dari tokoh masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.	62	1.00	5.00	3.3871	.98105
Senantiasa terjalin komunikasi secara berkesinambungan dan kesamaan tujuan antar pemangku kepentingan sehingga terbentuk kepercayaan bersama dalam mensukseskan kebijakan tersebut	62	1.00	5.00	3.0484	.87642
Adanya komitmen bersama dalam mendukung program dan kebijakan relaksasi pemungutan PBB bagi wajib pajak terdampak COVID-19 di Kota Bekasi.	62	1.00	5.00	3.8226	.77933
Adanya pemahaman bersama bahwa PBB yang dibayarkan oleh wajib pajak akan dipergunakan untuk pembangunan Kota Bekasi serta kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai fasilitas baik sarana, prasarana maupun pelayanan publik.	62	1.00	5.00	3.5161	1.15577
Collaborative_Governance	62	1.43	4.29	3.5479	.57872
Valid N (listwise)	62				

UJI ASUMSI KLASIK

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			62
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.50473889
Most Extreme Differences	Absolute		.117
	Positive		.075
	Negative		-.117
Test Statistic			.117
Asymp. Sig. (2-tailed)			.036 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.346 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.333
		Upper Bound	.358

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Collaborative_Governance ^b	.	Enter

- a. Dependent Variable: ABSRESID
- b. All requested variables entered.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.833	1.066		.781	.438
	Collaborative_Governance	.051	.042	.153	1.200	.235

- a. Dependent Variable: ABSRESID

REGRESI SEDERHANA

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Relaksasi_Pemungutan_Pajak	10.2097	2.84655	62
Collaborative_Governance	24.8387	4.04967	62

Correlations

		Relaksasi_Pemungutan_Pajak	Collaborative_Governance
Pearson Correlation	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	1.000	.475
	Collaborative_Governance	.475	1.000
Sig. (1-tailed)	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	.	.000
	Collaborative_Governance	.000	.
N	Relaksasi_Pemungutan_Pajak	62	62
	Collaborative_Governance	62	62

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Collaborative_Governance ^b	.	Enter

a. Dependent Variable:
Relaksasi_Pemungutan_Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.475 ^a	.226	.213	2.52553	1.908

a. Predictors: (Constant), Collaborative_Governance

b. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	111.577	1	111.577	17.493	.000 ^b
	Residual	382.697	60	6.378		
	Total	494.274	61			

a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

b. Predictors: (Constant), Collaborative_Governance

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.914	2.009		.953	.344					
	Collaborative_Governance	.334	.080	.475	4.183	.000	.475	.475	.475	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Collaborative_Governance
1	1	1.987	1.000	.01	.01
	2	.013	12.448	.99	.99

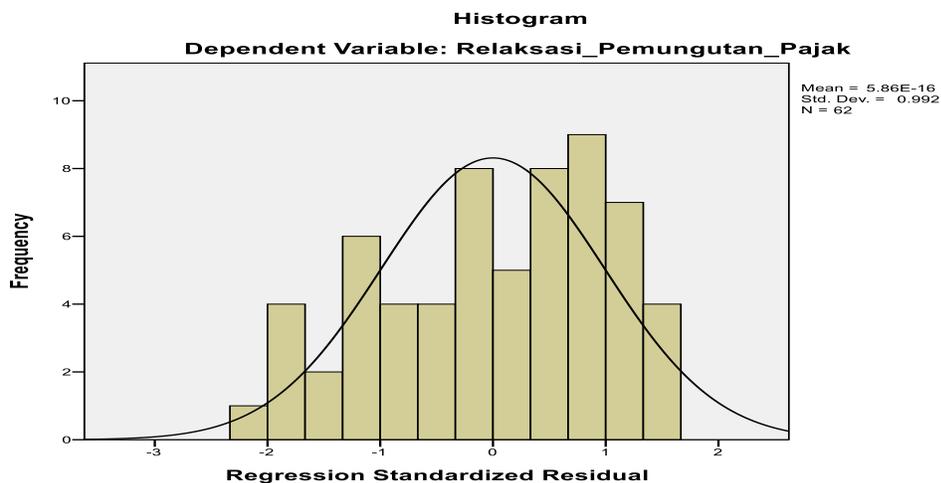
a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.2540	11.9334	10.2097	1.35246	62
Std. Predicted Value	-3.664	1.274	.000	1.000	62
Standard Error of Predicted Value	.321	1.227	.417	.181	62
Adjusted Predicted Value	5.3326	11.9304	10.2106	1.35554	62
Residual	-5.59751	4.07042	.00000	2.50474	62
Std. Residual	-2.216	1.612	.000	.992	62
Stud. Residual	-2.236	1.625	.000	1.003	62
Deleted Residual	-5.69708	4.14011	-.00090	2.56473	62
Stud. Deleted Residual	-2.316	1.649	-.003	1.013	62
Mahal. Distance	.002	13.426	.984	2.352	62
Cook's Distance	.000	.096	.012	.015	62
Centered Leverage Value	.000	.220	.016	.039	62

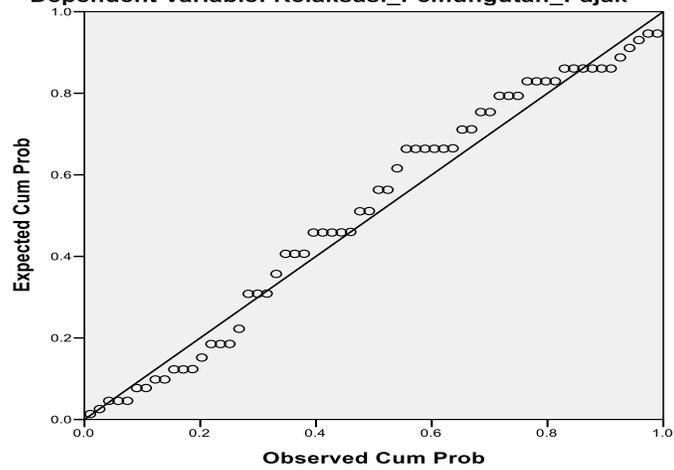
a. Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Relaksasi_Pemungutan_Pajak

